

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL, BELANJA DAERAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Putri Mulyana¹, Edi Abrial², Muhammad Nasir³

putrimulyanaiphone@gmail.com¹, ediabrial@pnl.ac.id², nasiraceh@pnl.ac.id³

Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Aceh meskipun pemerintah daerah telah memperoleh kewenangan yang lebih luas melalui kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan fiskal yang efektif melalui peningkatan kemandirian fiskal, optimalisasi belanja daerah, dan peningkatan investasi guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Aceh Dalam Angka, serta laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data panel dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2015–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan kemandirian fiskal mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kemiskinan. Sementara itu, investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara simultan, kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci : Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah, Investasi, Kemiskinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of fiscal independence, regional expenditure, and investment on poverty levels in the 23 regencies/municipalities of Aceh Province. Poverty remains one of the major development challenges in Aceh despite the implementation of regional autonomy policies that grant broader authority to local governments. Therefore, effective fiscal management through increased fiscal independence, optimized regional expenditure, and enhanced investment is expected to support poverty alleviation efforts. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), Aceh in Figures publications, and local government financial reports. The study utilizes panel data from 23 regencies/municipalities in Aceh Province covering the period of 2015–2024. Data analysis was conducted using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach to examine the influence of each independent variable on poverty levels. The results indicate that fiscal independence has a negative and significant effect on poverty, implying that higher fiscal independence contributes to poverty reduction. Regional expenditure has a positive and significant effect on poverty, suggesting that increases in regional expenditure have not yet been fully effective in reducing poverty. Meanwhile, investment has a negative and significant effect on poverty, indicating that increased investment can reduce poverty through job creation, higher economic activity, and improved community welfare. Simultaneously, fiscal independence, regional expenditure, and investment have a significant effect on poverty levels in Aceh Province.

Keywords: Fiscal Independence, Regional Expenditure, Investment.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan modern menempatkan sektor publik sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian fiskal menjadi indikator penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pemerintahan dan pelayanan publik melalui pendapatan sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan, sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung bergantung pada dana transfer.

Kondisi kemandirian fiskal Provinsi Aceh selama 2009–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dan cenderung rendah. Nilai tertinggi tercatat pada 2018 sebesar 0,1608. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri masih terbatas. Salah satu faktor yang berkaitan dengan kemandirian fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data PAD kabupaten/kota di Aceh menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam menggali potensi ekonomi lokal. Daerah dengan PAD tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya, sedangkan daerah dengan PAD rendah masih menghadapi keterbatasan dalam membiayai pembangunan.

Keterbatasan PAD menyebabkan pemerintah daerah masih bergantung pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Besarnya pendapatan transfer di berbagai kabupaten/kota menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal di Aceh masih cukup tinggi. Oleh karena itu, peningkatan PAD diperlukan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian fiskal yang lebih baik juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain kemandirian fiskal, belanja daerah menjadi faktor penting dalam pembangunan. Belanja daerah digunakan untuk mendukung penyediaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa belanja daerah kabupaten/kota di Aceh secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan terbatas atau penurunan. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya variasi kemampuan fiskal, efektivitas pengelolaan anggaran, dan prioritas pembangunan antarwilayah.

Peningkatan belanja daerah ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya belanja belum tentu menjamin efektivitas pengentasan kemiskinan, sehingga kualitas, ketepatan sasaran, dan alokasi belanja menjadi hal yang penting. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja diarahkan pada sektor-sektor produktif dan program yang benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Faktor lain yang menjadi perhatian adalah investasi, karena investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi juga mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola suatu daerah. Di Provinsi Aceh, investasi melalui PMDN maupun PMA diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Data rasio PMTB terhadap PDRB tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan tingkat investasi antar kabupaten/kota. Kota Sabang memiliki rasio tertinggi sebesar 62,71%, diikuti Aceh Barat Daya 56,48% dan Aceh

Jaya 51,59%, sedangkan Aceh Utara memiliki rasio terendah sebesar 17,66%.

Perbedaan tingkat investasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam melakukan akumulasi modal masih beragam. Daerah dengan investasi tinggi memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, peningkatan investasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, kemiskinan di Provinsi Aceh masih relatif tinggi, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Data yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada periode 2021–2024 masih berada pada angka yang cukup tinggi, dengan kemiskinan perkotaan pada tahun 2024 mencapai 10,46%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan kapasitas fiskal, belanja daerah, dan investasi dengan upaya penurunan kemiskinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara teori dan fakta empiris. Secara teoritis, kemandirian fiskal yang lebih tinggi, belanja daerah yang efektif, dan peningkatan investasi seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Namun, kemiskinan di Provinsi Aceh masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan judul “Analisis Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.”

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan berupa data kuantitatif dalam bentuk angka yang dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Variabel yang diteliti meliputi kemandirian fiskal, belanja daerah, investasi, dan kemiskinan. Data penelitian merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan data statistik yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, memilah, mempelajari, dan menggunakan dokumen yang dibutuhkan. Data diperoleh melalui website resmi BPS dan DJPK.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda memenuhi persyaratan statistik dan menghasilkan estimasi yang baik. Pengujian dilakukan menggunakan Eviews, yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1. Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan Jarque-Bera Test. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai probability lebih besar dari 0,05.
2. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak memiliki korelasi tinggi antarvariabel bebas. Berdasarkan metode korelasi berpasangan, apabila nilai korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,80 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan nilai lebih dari 0,80 menunjukkan adanya masalah multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan variance residual antarperiode pengamatan. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan bantuan Eviews. Apabila nilai signifikansi seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 12. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan cross section, sehingga dapat memberikan informasi mengenai perubahan antarwilayah dan antarwaktu. Penggunaan data panel juga dapat memperhitungkan heterogenitas antarindividu, memberikan variasi data yang lebih luas, mengurangi kolinearitas, meningkatkan jumlah observasi, serta menghasilkan estimasi yang lebih efisien.

Model penelitian digunakan untuk menganalisis pengaruh kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi terhadap kemiskinan. Secara umum, model penelitian memasukkan kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi sebagai variabel independen. Belanja daerah dan investasi juga ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln) untuk model yang digunakan.

a. Model Regresi Data Panel

Penelitian menggunakan tiga pendekatan dalam regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

1. Common Effect Model (CEM) menggabungkan seluruh data time series dan cross section dan mengestimasi parameter menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Model ini menganggap karakteristik antarunit pengamatan relatif sama.
2. Fixed Effect Model (FEM) menggunakan variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep antarunit pengamatan. Model ini mengasumsikan bahwa koefisien slope tetap, sedangkan intersep dapat berbeda antarwilayah atau pemerintah daerah.
3. Random Effect Model (REM) menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) dengan mempertimbangkan komponen error dari data cross section dan time series. Model ini menganggap perbedaan antarunit pengamatan sebagai bagian dari komponen error secara random.

Teknik Pemilihan Model

Pemilihan model regresi data panel dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara CEM, FEM, dan REM. Pengujian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Chow digunakan untuk memilih antara CEM dan FEM. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka model yang dipilih adalah FEM, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka CEM digunakan.
2. Uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa FEM lebih tepat, sedangkan nilai lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa REM lebih tepat digunakan.
3. Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara REM dan CEM. Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan untuk mengetahui apakah efek random lebih sesuai dibandingkan model common effect. Hasil pengujian digunakan untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

1. Uji statistik t (parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05.
2. Uji statistik F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengujian menggunakan tingkat keyakinan 95% atau tingkat kesalahan 5%. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berada antara 0% sampai 100%. Tingkat pengaruh dikategorikan menjadi sangat lemah (0–19,99%), lemah (20–39,99%), sedang (40–59,99%), kuat (60–79,99%), dan sangat kuat (80–100%).

Operasionalisasi Variabel

Penelitian menggunakan empat variabel utama, yaitu kemiskinan sebagai variabel dependen (Y), kemandirian fiskal (X1), belanja daerah (X2), dan investasi (X3). Kemiskinan diukur berdasarkan persentase tingkat kemiskinan yang bersumber dari BPS dengan skala persen. Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah, yang diukur dalam bentuk persen.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam suatu periode dan diukur menggunakan logaritma natural total belanja daerah (Ln Rupiah). Sementara itu, investasi merupakan pembentukan modal yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi daerah dan dalam penelitian ini diproses menggunakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diukur dalam bentuk Ln Rupiah.

Intinya, penelitian ini menggunakan data sekunder BPS dan DJPK untuk menganalisis pengaruh kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan regresi data panel menggunakan Eviews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 229 observasi, penelitian ini menganalisis Kemiskinan (KMS), Belanja Daerah (BD), Investasi (IVS), dan Kemandirian Fiskal (KF) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 15,90, median 15,92, nilai maksimum 23,79, dan minimum 6,90. Standar deviasi sebesar 3,63 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota memiliki variasi yang cukup tinggi.

Variabel Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 27,74, median 27,68, maksimum 28,60, dan minimum 26,73. Standar deviasi sebesar 0,38 menunjukkan bahwa belanja daerah antarwilayah relatif homogen dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar.

Variabel Investasi memiliki rata-rata sebesar 14,28, median 14,37, nilai maksimum 15,40, dan minimum 13,07. Standar deviasi sebesar 0,59 menunjukkan bahwa tingkat investasi antar kabupaten/kota relatif stabil dengan variasi yang tidak terlalu besar.

Sementara itu, Kemandirian Fiskal memiliki rata-rata sebesar 11,97, median 11,00, maksimum 36,25, dan minimum 1,95. Standar deviasi sebesar 5,61 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam kemampuan fiskal antar daerah. Secara keseluruhan,

statistik deskriptif menunjukkan bahwa kemiskinan dan kemandirian fiskal memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan belanja daerah dan investasi.

2. Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian menggunakan tiga pendekatan regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Ketiga model tersebut digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai dalam menjelaskan pengaruh kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Hasil estimasi CEM menunjukkan bahwa kemandirian fiskal memiliki koefisien negatif sebesar -0,276021, belanja daerah memiliki koefisien positif sebesar 1,789624, dan investasi memiliki koefisien negatif sebesar -2,130919. Seluruh variabel memiliki probabilitas 0,0000 sehingga secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada FEM, kemandirian fiskal memiliki koefisien -0,281103, belanja daerah sebesar 2,696279, dan investasi sebesar -2,326753. Model FEM juga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota melalui nilai fixed effect. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan masing-masing daerah tidak hanya dipengaruhi oleh variabel yang diteliti, tetapi juga oleh karakteristik khusus setiap wilayah.

REM menghasilkan koefisien yang sama dengan FEM dalam data yang disajikan. Namun, penentuan model tidak hanya didasarkan pada nilai koefisien, melainkan melalui pengujian pemilihan model.

3. Uji Pemilihan Model

Hasil Uji Chow memperoleh nilai Cross-section F sebesar 83,992595 dengan probabilitas 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka CEM ditolak dan FEM dipilih. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh sehingga penggunaan FEM lebih sesuai.

Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan nilai Chi-Square sebesar 14,884308 dengan probabilitas 0,0019. Karena $0,0019 < 0,05$, maka REM ditolak dan FEM diterima. Dengan demikian, hasil Uji Hausman kembali menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling tepat.

Uji LM menunjukkan probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 sehingga apabila hanya dibandingkan antara CEM dan REM, maka REM lebih tepat. Namun, karena Uji Chow dan Uji Hausman telah sama-sama menghasilkan FEM, maka Uji LM sebenarnya tidak menjadi dasar penentuan model akhir. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini tetap Fixed Effect Model (FEM).

4. Uji Asumsi Klasik

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model. Berdasarkan hasil pengujian White Heteroskedasticity, nilai probabilitas variabel yang diuji berada di atas 0,05. Dengan demikian, berdasarkan hasil yang disajikan, model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

5. Hasil Regresi Data Panel FEM

Berdasarkan model FEM, diperoleh persamaan:

$$KMS = -22,29638 - 0,281103KF + 2,696279BD - 2,326753IVS$$

Konstanta sebesar -22,29638 menunjukkan nilai dasar kemiskinan ketika seluruh variabel independen dianggap bernilai nol. Namun, dalam model FEM, konstanta tidak dapat dipisahkan dari karakteristik khusus masing-masing daerah karena setiap kabupaten/kota memiliki nilai fixed effect yang berbeda.

Nilai fixed effect menunjukkan bahwa Aceh Barat memiliki nilai tertinggi sebesar 6,833152, kemudian Aceh Utara sebesar 6,395090, Pidie sebesar 5,249671, Bener Meriah sebesar 4,510778, dan Nagan Raya sebesar 4,257015. Kondisi tersebut menunjukkan

adanya karakteristik daerah yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi setelah pengaruh variabel kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi dikendalikan.

Sebaliknya, Kota Langsa memiliki fixed effect terendah sebesar -5,667538, diikuti Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Sabang, dan Banda Aceh. Nilai negatif menunjukkan bahwa karakteristik khusus daerah tersebut cenderung berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah dalam model.

6. Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Kemiskinan

Kemandirian fiskal memiliki koefisien sebesar -0,281103 dengan probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Artinya, setiap peningkatan kemandirian fiskal sebesar satu satuan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,281103 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan sendiri, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan program perlindungan sosial.

Daerah yang memiliki aktivitas ekonomi lebih berkembang seperti Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, dan Sabang cenderung memiliki kondisi yang lebih mendukung peningkatan pendapatan daerah. Sebaliknya, daerah seperti Aceh Barat, Aceh Utara, dan Pidie masih memiliki fixed effect positif yang tinggi sehingga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kemiskinan struktural.

Dengan demikian, peningkatan kemandirian fiskal tidak hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga perlu disertai dengan pengembangan ekonomi lokal yang produktif sehingga peningkatan pendapatan daerah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

7. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan

Belanja daerah memiliki koefisien sebesar 2,696279 dengan probabilitas 0,0000, sehingga belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Artinya, peningkatan belanja daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 2,696279 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya belanja pemerintah belum tentu secara otomatis menurunkan kemiskinan.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh komposisi belanja yang belum sepenuhnya diarahkan kepada kegiatan produktif dan masyarakat miskin. Belanja yang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin, administrasi, dan pegawai dapat memiliki dampak yang lebih kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Selain itu, terdapat kemungkinan reverse causality, yaitu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi justru mendapatkan alokasi belanja yang lebih besar karena pemerintah harus menyediakan anggaran untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian bukan hanya jumlah belanja daerah, tetapi juga efektivitas, kualitas, dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.

8. Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan

Investasi memiliki koefisien sebesar -2,326753 dengan probabilitas 0,0000, sehingga investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Artinya, peningkatan investasi sebesar satu satuan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,326753 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien investasi yang paling besar secara absolut menunjukkan bahwa investasi menjadi salah satu faktor yang paling kuat dalam menurunkan kemiskinan dalam model penelitian.

Investasi dapat memberikan dampak melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya aktivitas usaha. Daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis seperti Banda Aceh, Langsa, Sabang, dan Lhokseumawe memiliki peluang lebih besar memperoleh manfaat investasi.

Namun, manfaat investasi tidak selalu merata. Daerah seperti Aceh Barat, Aceh Utara, dan Pidie masih memiliki fixed effect positif yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang besar belum tentu secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masih terdapat keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterampilan tenaga kerja, infrastruktur, dan investasi yang kurang padat karya.

9. Uji Simultan

Hasil Uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 11,68637 dengan probabilitas 0,000000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Dengan demikian, Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah, dan Investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Kemampuan fiskal daerah, kebijakan pengeluaran pemerintah, dan aktivitas investasi saling berkaitan dalam memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi antara penguatan pendapatan daerah, perbaikan kualitas belanja, dan peningkatan investasi produktif.

10. Uji Parsial

Hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Kemandirian Fiskal memiliki nilai probabilitas 0,0000 dan koefisien negatif, sehingga berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan.

Belanja Daerah memiliki probabilitas 0,0000 dan koefisien positif, sehingga berpengaruh signifikan tetapi arahnya menunjukkan peningkatan kemiskinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran perlu dievaluasi agar lebih diarahkan pada program yang produktif dan langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.

Investasi memiliki probabilitas 0,0000 dan koefisien negatif, sehingga berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, ketiga variabel terbukti berpengaruh signifikan, tetapi kemandirian fiskal dan investasi memiliki arah negatif, sedangkan belanja daerah memiliki arah positif terhadap kemiskinan.

11. Koefisien Determinasi

Nilai R-squared sebesar 0,357925, sedangkan Adjusted R-squared sebesar 0,354890 atau 35,49%. Artinya, kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 35,49% variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Sementara itu, sebesar 64,51% variasi kemiskinan dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Faktor tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, inflasi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan faktor sosial ekonomi lainnya.

Pembahasan

1. Pengaruh Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah Dan Investasi Secara Parsial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai koefisien sebesar -0,281103 dan probabilitas 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan

daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah.

Secara faktual, kondisi ini dapat dilihat pada beberapa kabupaten/kota yang memiliki aktivitas ekonomi relatif berkembang seperti Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang. Daerah-daerah tersebut memiliki basis ekonomi yang lebih beragam melalui sektor perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan industri sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif lebih baik dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer. Kondisi tersebut tercermin pada nilai fixed effect yang negatif, seperti Kota Langsa (-5,667538), Kota Sabang (-3,818561), Kota Banda Aceh (-3,571271), dan Kota Lhokseumawe (-0,251178). Nilai ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah tersebut cenderung mendorong tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh.

Sebaliknya, daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat serta memiliki keterbatasan aktivitas ekonomi lokal seperti Aceh Barat (6,833152), Aceh Utara (6,395090), dan Pidie (5,249671) masih menunjukkan kecenderungan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Meskipun beberapa daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, kemampuan mengubah potensi ekonomi menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan masih relatif terbatas. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah daerah untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan menjadi kurang optimal.

Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal bukan hanya berkaitan dengan peningkatan PAD, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengembangkan basis ekonomi lokal yang produktif. Semakin kuat aktivitas ekonomi daerah, semakin besar peluang pemerintah memperoleh pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dyah Mustikaningrum dan Yuni Prihadi Utomo (2025) serta Riko Tri Fasholla (2018) yang menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Zahirah dan Dewi (2025) yang menemukan pengaruh positif kemandirian fiskal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi dan efektivitas pengelolaan fiskal pada masing-masing daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 2,696279 dan probabilitas sebesar 0,0000. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah selama periode penelitian belum mampu secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Secara empiris, hasil ini cukup relevan dengan kondisi pembangunan di Aceh. Selama periode penelitian, pemerintah kabupaten/kota memperoleh alokasi anggaran yang relatif besar, baik yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun transfer lainnya dari pemerintah pusat. Namun, tingkat kemiskinan Aceh masih termasuk salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui kondisi beberapa daerah yang memiliki nilai fixed effect positif tinggi seperti Aceh Barat (6,833152), Aceh Utara (6,395090), Pidie (5,249671), Bener Meriah (4,510778), dan Nagan Raya (4,257015). Daerah-daerah ini selama bertahun-tahun menerima alokasi belanja daerah yang cukup besar, tetapi tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi program pembangunan yang produktif dan mampu menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena sebagian besar belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai,

belanja administrasi pemerintahan, dan belanja rutin lainnya yang memiliki dampak ekonomi tidak langsung terhadap masyarakat miskin. Selain itu, beberapa program pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Sebaliknya, daerah seperti Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Sabang, Aceh Selatan, dan Aceh Tenggara menunjukkan nilai fixed effect negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun menerima belanja daerah yang relatif lebih kecil dibandingkan beberapa kabupaten besar lainnya, kualitas pemanfaatan anggaran cenderung lebih efektif dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riko Tri Fasholla (2018) serta Zahirah dan Dewi (2025) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Risdiyanto et al. (2023) di Papua dan Rabani dan Hutabarat (2025) di Maluku yang menemukan bahwa belanja daerah justru mampu menurunkan kemiskinan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan belanja daerah dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada kualitas alokasi dan efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama di Aceh bukan terletak pada jumlah anggaran yang tersedia, melainkan pada efektivitas penggunaan anggaran dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -2,326753 dan probabilitas sebesar 0,0000. Koefisien ini merupakan yang terbesar dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan faktor yang paling dominan dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara faktual, investasi memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas produksi, memperluas peluang usaha masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, daerah yang mampu menarik investasi dalam jumlah besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Kondisi ini terlihat pada Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe yang memiliki aktivitas ekonomi lebih dinamis dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya. Keberadaan sektor perdagangan, jasa, pendidikan, perhotelan, transportasi, dan industri memberikan daya tarik investasi yang lebih besar sehingga mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Hal tersebut tercermin dari nilai fixed effect yang relatif rendah atau negatif pada daerah-daerah tersebut.

Selain itu, beberapa daerah seperti Aceh Tenggara (-5,473187), Aceh Selatan (-4,587897), dan Aceh Jaya (-4,435172) juga menunjukkan kecenderungan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa investasi yang masuk pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, daerah seperti Aceh Barat, Aceh Utara, dan Pidie masih menunjukkan nilai fixed effect positif yang tinggi meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang masuk belum mampu menciptakan efek pengganda yang optimal terhadap masyarakat lokal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, dan dominasi investasi pada sektor yang kurang padat karya sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin.

Temuan ini menunjukkan bahwa investasi yang berkualitas dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan peningkatan belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu,

pemerintah daerah di Aceh perlu memperkuat iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhammad Fairuz Ihsan dan Muda Setia Hamid (2025) yang menunjukkan bahwa investasi memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan investasi dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya belanja pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan daerah membangun kemandirian fiskal dan menarik investasi produktif. Daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi kuat, tingkat investasi tinggi, dan kemampuan fiskal yang lebih baik cenderung menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah dan memiliki aktivitas ekonomi yang kurang berkembang.

2. Pengaruh Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah Dan Investasi Secara Simultan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil pengujian simultan (uji F), variabel Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah, dan Investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2015–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel tertentu, melainkan merupakan hasil interaksi antara kemampuan fiskal daerah, kebijakan pengeluaran pemerintah, dan aktivitas investasi yang terjadi secara bersamaan.

Secara teoritis, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan melalui sumber pendapatan daerah, belanja daerah menggambarkan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan publik dan pembangunan, sedangkan investasi mencerminkan aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki keterkaitan yang erat dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

Secara empiris, hasil penelitian ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Aceh. Meskipun Aceh memperoleh alokasi dana yang relatif besar melalui Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan berbagai transfer pemerintah pusat lainnya, tingkat kemiskinan di Aceh masih menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola fiskal, mengalokasikan belanja secara efektif, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Jika dikaitkan dengan hasil Fixed Effect Model, terlihat adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat (6,833152), Aceh Utara (6,395090), Pidie (5,249671), Bener Meriah (4,510778), dan Nagan Raya (4,257015) memiliki efek tetap positif yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal dan belanja daerah yang cukup besar, faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi yang kurang terdiversifikasi, tingginya ketergantungan pada sektor primer, rendahnya produktivitas

tenaga kerja, serta belum optimalnya investasi produktif masih menjadi hambatan dalam menurunkan kemiskinan.

Sebaliknya, Kota Langsa (-5,667538), Aceh Tenggara (-5,473187), Aceh Selatan (-4,587897), Aceh Jaya (-4,435172), Kota Sabang (-3,818561), dan Kota Banda Aceh (-3,571271) memiliki efek tetap negatif yang menunjukkan kecenderungan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi antara kapasitas fiskal daerah, efektivitas penggunaan anggaran, dan aktivitas investasi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal. Daerah-daerah tersebut umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih berkembang melalui sektor perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, maupun usaha mikro dan kecil yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan di Aceh tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan salah satu aspek pembangunan. Kemandirian fiskal yang tinggi tanpa investasi yang memadai tidak akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, investasi yang tinggi juga tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai melalui belanja daerah yang efektif. Oleh karena itu, sinergi antara kemandirian fiskal, belanja daerah, dan investasi menjadi faktor penting dalam menekan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zahirah dan Dewi (2025) yang menemukan bahwa kemandirian fiskal, transfer dana, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Persamaannya terletak pada signifikansi pengaruh variabel fiskal terhadap kemiskinan. Namun, perbedaannya terdapat pada arah pengaruh kemandirian fiskal. Dalam penelitian ini, kemandirian fiskal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pada penelitian Zahirah dan Dewi (2025) berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Desti Putri Meysinta dan Zahriatul Aini (2025) yang menemukan bahwa PAD, pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa instrumen fiskal daerah memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian Rabani dan Hutabarat (2025) di Provinsi Maluku juga menemukan bahwa PAD, belanja daerah, dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pentingnya faktor fiskal daerah sebagai instrumen pengurangan kemiskinan. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini memasukkan variabel investasi sebagai faktor utama pembangunan ekonomi daerah, yang terbukti memiliki pengaruh negatif paling besar terhadap kemiskinan.

Penelitian Risdiyanto et al. (2023) di Provinsi Papua juga mendukung hasil penelitian ini bahwa kemandirian fiskal dan belanja daerah merupakan faktor penting dalam menjelaskan variasi kemiskinan antarwilayah. Akan tetapi, penelitian tersebut menemukan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut relatif kecil karena kondisi geografis dan keterbatasan akses pembangunan yang masih menjadi kendala utama di Papua. Sementara itu, dalam konteks Aceh, faktor investasi terbukti memberikan kontribusi yang lebih kuat dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan faktor fiskal semata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor fiskal dan faktor ekonomi. Kemandirian fiskal yang tinggi mampu meningkatkan kapasitas pembangunan daerah, belanja daerah yang efektif dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan investasi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi

yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengurangan kemiskinan di Provinsi Aceh perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta percepatan investasi produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah, dan Investasi terhadap Kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2015–2024 dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect Model (FEM), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal (KF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t-statistic sebesar -37,93148 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
2. Belanja Daerah (BD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t-statistic sebesar 21,42987 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah selama periode penelitian belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa alokasi dan efektivitas penggunaan belanja daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih tepat sasaran dalam mendukung program pengurangan kemiskinan.
3. Investasi (IVS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t-statistic sebesar -26,81583 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan masyarakat di daerah.
4. Kemandirian Fiskal, Belanja Daerah, dan Investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F-statistic sebesar 117,9603 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000000 ($< 0,05$), sehingga H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah agar lebih diarahkan pada program-program yang produktif dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Belanja daerah hendaknya lebih difokuskan pada sektor-sektor yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kemiskinan secara lebih komprehensif.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan terus meningkatkan kegiatan investasi pada sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2019). *Ekonometrika: Teori dan aplikasi*. Ekonisia FE UII.
- Amalia. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian fiskal daerah*. Rajawali Pers.
- Anoraga, P. (2019). *Manajemen investasi dan pasar modal*. Rineka Cipta.
- Ansofino, Arfilindo, & Yolamalinda. (2016). *Buku ajar ekonometrika*. Deepublish.
- Ansori, M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif*. Airlangga University Press.
- Arifin, J. (2019). *Investasi syariah: Konsep dan implementasi*. Deepublish.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan keuangan pemerintah daerah dan indeks kemandirian fiskal*. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kemiskinan Provinsi Aceh 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik di Indonesia (Edisi pertama)*. BPFE UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi.
- Budi Winarno. (2019). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.
- Damodar, N. G., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Digdownseiso, K. (2023). *Ekonomi publik dan desentralisasi fiskal daerah*. Lembaga Penerbit Universitas Nasional.
- Dumairy. (2019). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Effendi, T. N. (2019). *Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan*. Rineka Cipta.
- Fahrati, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 115–128.
- Fasholla, R. T. (2018). Pengaruh belanja daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan asli daerah terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap periode tahun 2011–2016. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(1), 45–59.
- Ferdinand, A. (2019). *Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen (Edisi ke-3)*. AGF Books.
- Firdausy, C. M. (2017). *Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2019). *Basic econometrics*. McGraw-Hill.
- Halim, A. (2019). *Analisis investasi dan aplikasinya*. Salemba Empat.
- Hamid, M. S., & Ihsan, M. F. (2025). Pengaruh investasi dan belanja modal pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 1–15.

- Hunter, J. S. (2019). *Fiscal autonomy and local government finance*. Routledge.
- Kasmir. (2019). *Pengantar manajemen keuangan (Edisi ke-2)*. Kencana.
- Komaruddin. (2018). *Kamus istilah ekonomi dan bisnis*. Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Meysinta, D. P., & Aini, Z. (2025). Pengaruh PAD, pendapatan transfer, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan (Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020–2023). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 13(2), 85–101.
- Mustikaningrum, D., & Utomo, Y. P. (2025). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, rasio gini, pengangguran, indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2017–2022. *Jurnal Ekonomi Regional*, 11(1), 33–49.
- Nasution, A., Siregar, H., & Lubis, M. (2018). Analisis rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 5(2), 90–105.
- Novalistia, R. (2018). Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 12–24.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rabani, M. R., & Hutabarat, R. E. (2025). Pengaruh belanja daerah, PAD dan IPM terhadap kemiskinan Provinsi Maluku tahun 2020–2024. *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 2206–2226.
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis kemandirian fiskal dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1813–1822.
- Rizal, M. (2018). *Manajemen portofolio dan investasi*. Alfabeta.
- Sampurna, B. (2018). Analisis indeks kemandirian fiskal daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 4(2), 75–91.
- Samuri. (2018). *Manajemen risiko investasi syariah*. Prenadamedia Group.
- Sinamora, H. (2019). *Manajemen sumber daya manusia (Edisi 1)*. STIE YKPN.
- Sudiyarti, N., Hidayat, T., & Kurniawan, A. (2019). Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 145–159.
- Sugiyono. (2018). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Sukanto, S. (2009). Analisis daya saing ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 86–102.
- Sukirno, S. (2018). *Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi ke-3)*. RajaGrafindo Persada.
- Suwanto, T. Y., & Yuniarsih, T. (2018). *Manajemen sumber daya manusia: Teori, aplikasi, dan isu penelitian*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya (Edisi ke-3)*. Ekonisia.
- Widianto, A., Prasetyo, E., & Nugroho, B. (2016). Pengaruh kemandirian fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 17(1), 55–68.
- Widjaja, H. A. W. (2019). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. RajaGrafindo Persada.
- Zahirah, Y. N., & Dewi, D. D. (2025). The effect of fiscal independence ratio, transfer funds and regional expenditure on poverty in Central Java Province 2020–2024. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 647–657.